



**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:

Naura Adir Fanezya

NIM. 150810101012

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

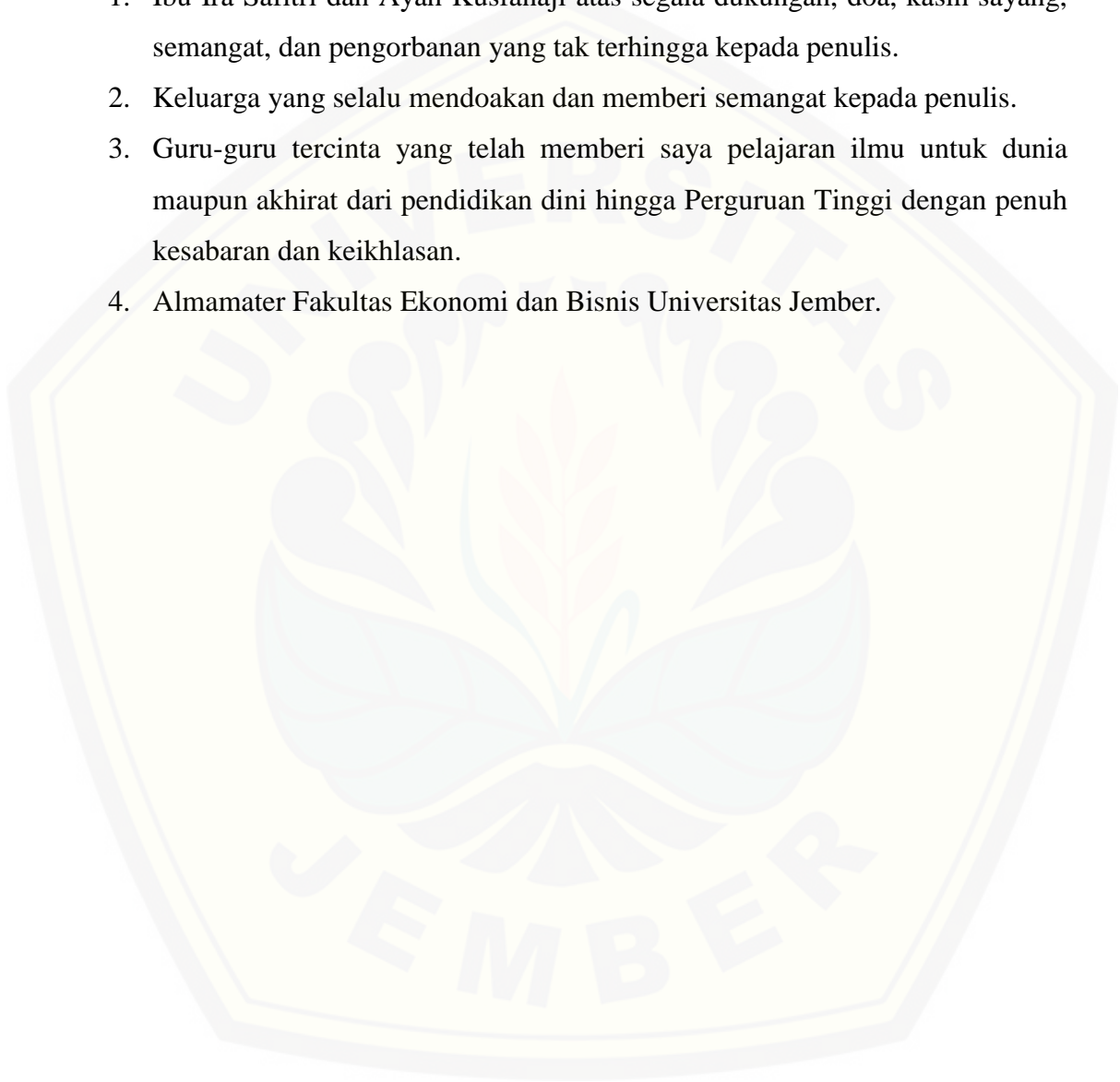
**Naura Adir Fanezya
NIM. 150810101012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Ira Safitri dan Ayah Kusfanaji atas segala dukungan, doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
3. Guru-guru tercinta yang telah memberi saya pelajaran ilmu untuk dunia maupun akhirat dari pendidikan dini hingga Perguruan Tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

“*La Tahla*. Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah (2) : 286)

“Ridha Allah Ta’ala bergantung pada ridho orang tua kita dan murka Allah Ta’ala juga tergantung pada murka orang tua kita”

(H.R at-Tirmidzi : 1899)

“Don’t wait on perfect conditions for success to happen. Just go ahead and do something“.

(Dan Miller)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Naura Adir Fanezya

NIM : 150810101012

Judul : Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar ditulis dari hasil kerja saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 10 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Naura Adir Fanezya

NIM. 150810101012

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:

Naura Adir Fanezya
NIM. 150810101012

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Mahasiswa : Naura Adir Fanezya
NIM : 150810101012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 29 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

NIP. 197806162003122001

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si.

NIP. 197106102001122002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN**Judul Skripsi****ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Naura Adir Fanezya

NIM : 150810101012

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

07 November 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
2. Sekretaris : Dr. M. Fathorrazi, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196306141990021001
3. Anggota : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196907181995122001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Naura Adir Fanezya

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Setiap negara pasti memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian negaranya sehingga kesejahteraan rakyatnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan berhasilnya suatu pembangunan negara akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi negara, yang mana dari hasil-hasil tersebut harus dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto DI.Yogyakarta terus meningkat tiap tahunnya. Dengan semakin membaiknya perekonomian, maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat PDRB daerah maka semakin sejahtera penduduknya sehingga pendapatan tinggi dan merata antar daerah akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Namun pada kenyataannya, nilai rasio gini DI. Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Menurut data yang terbaru, DI. Yogyakarta merupakan provinsi peringkat pertama yang memiliki tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia sebesar 0,441 pada Maret 2018, yang lebih tinggi dari tingkat ketimpangan nasional. Hal ini sejalan dengan teori Neo Marxist yang apabila terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dari hal-hal tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi terhadap tingkat Produk Domestik Regional Bruto, tingkat Kemiskinan dan tingkat Indeks Pembangunan Manusia di D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data deret waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 5 data kabupaten/kota di DI. Yogyakarta. Yang kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis regresi data panel menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.

Kata kunci : Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia

*ANALYSIS OF INEQUALITY DISTRIBUTION INCREASE AND FACTORS
THAT INFLUENCE IT IN DI. YOGYAKARTA*

Naura Adir Fanezya

*Departement of Economics, Faculty of Economics and Business,
University of Jember*

ABSTRACT

Every country must have the main goal to improve the economy of the country so that the welfare of its people becomes better over time. The success of a country's development will also increase the country's economic growth, which from these results must be enjoyed fairly and equally by all people. Based on data from the Central Statistics Agency, DI Yogyakarta's Gross Regional Domestic Product continues to increase every year. With the improving economy, the level of welfare of its population will also increase. In other words, the higher the level of regional GDP, the more prosperous the population so that high and even income between regions will reduce the level of income distribution inequality. But in reality, the value of the Gini ratio DI. Yogyakarta experiences fluctuations from year to year. According to the latest data, DI. Yogyakarta is the first ranked province with the highest Gini ratio in Indonesia of 0.441 in March 2018, which is higher than the level of national inequality. This is in line with the Neo Marxist theory that if there is an increase in economic growth, it will increase income inequality. From these things, this study aims to determine the effect of income distribution inequality that occurs on the level of Gross Regional Domestic Product, the level of Poverty and the level of Human Development Index in D.I Yogyakarta. This study uses secondary data in the form of time series data from 2010 to 2016 and cross section of 5 districts / cities in DI. Yogyakarta. Which then is processed and analyzed by panel data regression analysis using the Eviews 9 program. The results showed that the variables used significantly influence the Inequality of District / City Revenue Distribution in the Yogyakarta D.I Province.

Keywords: Inequality of Income Distribution, Gross Regional Domestic Product, Poverty, Human Development Index

RINGKASAN

Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Naura Adir Fanezya, 150810101012, 2019, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Setiap negara pasti memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan perekonomian negaranya sehingga taraf hidup atau kesejahteraan rakyatnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dirancang oleh suatu pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Devi, 2006). Namun, untuk kemajuan suatu negara, pembangunan bukan merupakan suatu tujuan negara dalam menyelesaikan permasalahan negara. Pembangunan ini hanya alat sebagai proses untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara dan mengurangi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan berhasilnya suatu pembangunan negara akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi negara, yang mana dari hasil-hasil tersebut harus dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Menurut Arif dan Rossy (2017), pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara cepat, belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam proses pembangunan. Justru, dalam perekonomian ekonomi yang cepat akan memberi dampak pada ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Dalam suatu pembangunan ekonomi yang lebih ditujukan pada pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan memakan waktu yang relatif lebih lama untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang menikmati hasil dari pendapatan masyarakat. Sedangkan sisanya masih belum merasakan dampak dari kenaikan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan oleh

daerah. Karena dampak yang akan terjadi bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga bisa dari segi sosial. Terjadinya kesenjangan sosial.

Kaitannya dengan ketimpangan, indeks gini merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks gini ini terdiri dari nilai 0 hingga 1. Jika indeks gini=0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang artinya setiap orang sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika indeks gini=1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau dengan kata lain, pendapatan hanya diterima oleh satu orang ataupun satu kelompok saja. Nilai rasio gini DI. Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Menurut data yang terbaru, DI. Yogyakarta merupakan provinsi peringkat pertama yang memiliki tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia sebesar 0,441 pada Maret 2018, yang lebih tinggi dari tingkat ketimpangan nasional. Hal ini sejalan dengan teori Neo Marxist yang apabila terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data deret waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 5 data kabupaten/kota di DI. Yogyakarta. Yang kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis regresi data panel menggunakan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB, variabel Kemiskinan dan variabel IPM yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan berpengaruh dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan DI. Yogyakarta. Yang mana untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan DI. Yogyakarta. Variabel Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan DI. Yogyakarta. Dan terakhir, variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan DI. Yogyakarta.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia – Nya, sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berupa motivasi, nasehat, saran, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E., selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah, terimakasih atas segala bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Riniati, M.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan dalam meluangkan waktu untuk bimbingannya.
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibu Ira Safitri dan Ayah Kusfanaji terimakasih yang selalu mengingatkan dan membimbing sampai saat ini, terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan semangat, dan doa yang selalu beliau-beliau panjatkan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Adik Reghina Aulia Pramesti dan Adik Muhammad Ghibrar Fanaji terimakasih selalu mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh kesabaran.
9. Seluruh keluarga terimakasih yang juga secara tidak langsung selalu mendoakan dan memberi dukungan.
10. Teman-teman POS 13 – 14 yang masih selalu ada sampai sekarang. Yang makin lama bersama, makin mengerti sesama.
11. Teman-teman Pincuk seperjuangan Nungkrong, Sapiks, Wudiwudpeker, Gukgik, Agustia dan Ibuk Fara, terimakasih yang selalu ada, saling memberi semangat dan dukungan, saling menghibur dikala penat mulai terasa.
12. Teman-teman KKN Selep Marsudi terimakasih yang selama 45 hari sampai sekarang masih terus berkomunikasi walaupun bertemu kembali untuk kita masih sulit.
13. Teman-teman IESP angkatan '15 terimakasih atas dukungan dan doanya.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 10 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Ketimpangan	8
2.1.1.1 Ukuran Ketimpangan	9
2.1.1.2 Penyebab Ketimpangan Ekonomi	11
2.1.2 Distribusi Pendapatan.....	12
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	14
2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi.....	16

2.1.5	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.4.1	Produk Domestik Regional Bruto	17
2.1.4.2	Kemiskinan	19
2.1.4.3	Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2.2	Penelitian Sebelumnya.....	25
2.3	Kerangka Konseptual.....	32
2.4	Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian	34
3.1.1	Jenis Penelitian.....	34
3.1.2	Unit Analisis	34
3.1.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2	Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.3	Analisis Regresi Data Panel	35
3.3.1	Metode Common Effect	35
3.3.2	Metode Fixed Effect.....	35
3.3.3	Metode Random Effect	35
3.4	Uji Statistik	36
3.4.1	Uji Koefisien Determinasi	36
3.4.2	Uji F	36
3.4.3	Uji t	37
3.5	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.5.1	Uji Multikolinearitas	38
3.5.2	Uji Heterokedastisitas	38
3.5.3	Uji Normalitas.....	39
3.6	Defini Operasional Variabel	39
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
4.2	Gambaran Umum Variabel	43
4.2.1	Gambaran Perkembangan PDRB D.I Yogyakarta	43
4.2.2	Gambaran Perkembangan Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta.....	45

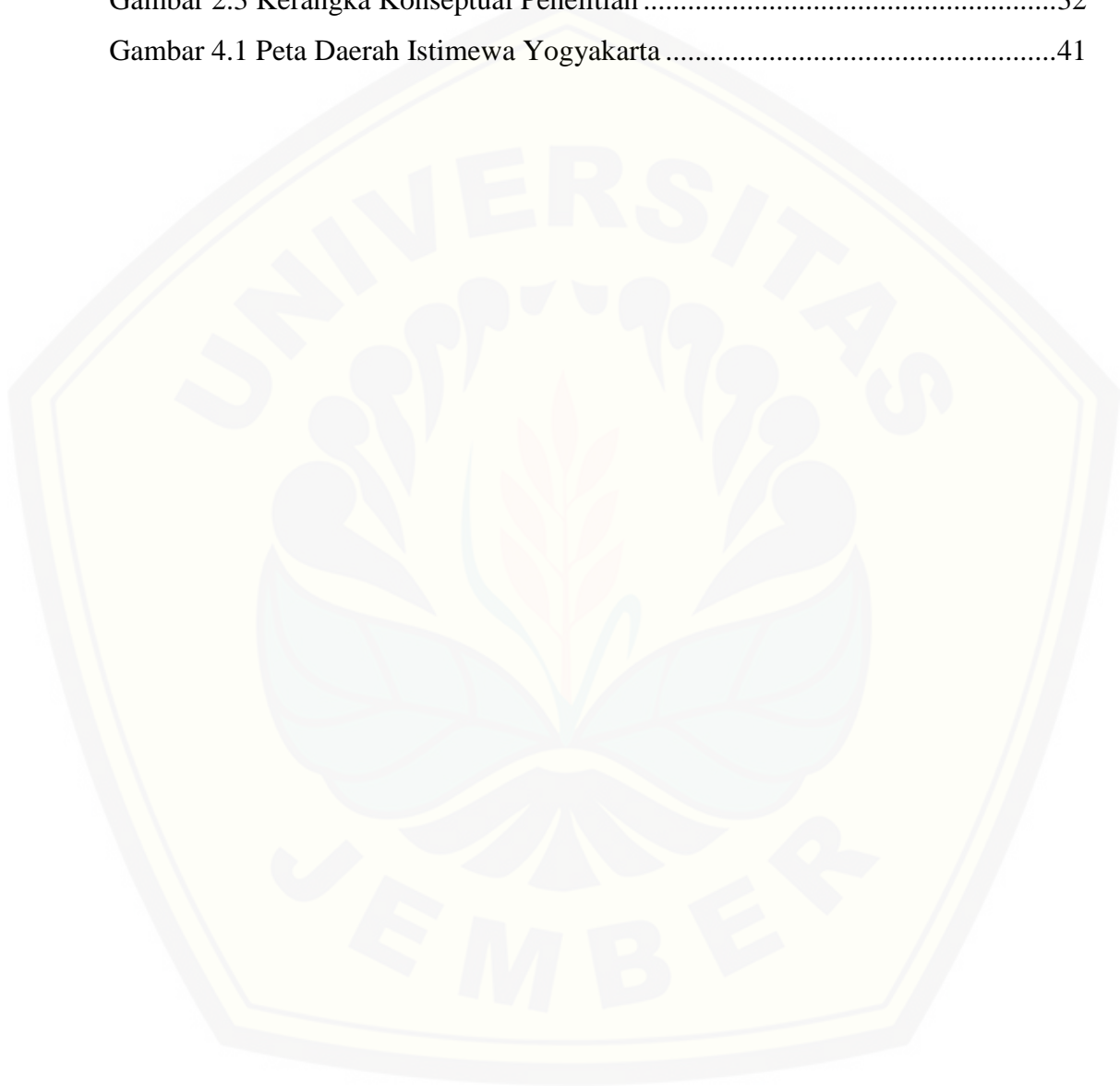
4.2.3	Gambaran Perkembangan Tingkat IPM D.I Yogyakarta.....	47
4.3	Hasil Uji Regresi Data Panel	49
4.3.1	Pemilihan Model Regresi	49
4.3.2	Estimasi Fixed Effect	52
4.3.3	Uji Statistik	53
4.3.4	Uji Asumsi Klasik.....	55
4.4	Pembahasan.....	58
4.4.1	Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di D.I Yogyakarta.....	58
4.4.2	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di D.I Yogyakarta	59
4.4.3	Analisis Pengaruh Tingkat IPM terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di D.I Yogyakarta	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta Atas Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan D.I Yogyakarta Tahun 2010 – 2016.....	3
Tabel 1.2 Nilai Indeks Gini D.I Yogyakarta Tahun 2010 – 2016.....	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 4.1 Median, Mean, Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2010 – 2016 (dalam Milyar).....	44
Tabel 4.2 Median, Mean, Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2010 – 2016 (dalam Jiwa)	46
Tabel 4.3 Median, Mean, Nilai Tertinggi dan Nilai Terendah IPM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2010 – 2016 (dalam Persen).....	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Common Effect Model	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Fixed Effect Model	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Random Effect Model	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Fixed Effect Model	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Individu (Uji t).....	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolineartitas	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznet “U-Terbalik”	9
Gambar 2.2 Kurva Lorenz.....	10
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	32
Gambar 4.1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	68
Lampiran 2. Hasil Uji Regresi Data Panel	72



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan perekonomian negaranya sehingga taraf hidup atau kesejahteraan rakyatnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Salah satunya melalui upaya peningkatan pembangunan ekonomi di Negeranya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dirancang oleh suatu pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada (Devi, 2006).

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah merupakan suatu proses dimana bagian pemerintahan daerah juga masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan dapat membentuk suatu pola kerjasama antar pemerintahan daerah tersebut dengan sektor swasta dengan tujuan menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah (Alfiatus, 2018).

Namun, untuk kemajuan suatu negara, pembangunan bukan merupakan suatu tujuan negara dalam menyelesaikan permasalahan negara. Pembangunan ini hanya alat sebagai proses untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara dan mengurangi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan dari satu daerah dengan daerah yang lain merupakan inti dari suatu pembangunan. Dengan berhasilnya suatu pembangunan negara akan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi negara, yang mana dari hasil-hasil tersebut harus dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sehingga dengan adanya hal ini, permasalahan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan terjadi lagi. Jika pembangunan dan pertumbuhan negara berhasil meningkat, maka seluruh masyarakat pun akan merasakan dampaknya melalui naiknya tingkat pendapatan masyarakat. Jika dalam suatu daerah terdapat pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi, dapat diindikasikan bahwa dari pertumbuhan ekonomi hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan tersebut (Ferdinand, 2017).

Dari hal tersebut, kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat dilihat dari kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita. Dan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan negara juga bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terus menunjukkan peningkatan, dapat menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara tersebut dalam keadaan baik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara terus menunjukkan penurunan, maka dapat menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara tersebut sedang dalam keadaan tidak baik. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan suatu proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut Arif dan Rossy (2017), pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara cepat, belum tentu dapat terjadi keberhasilan dalam proses pembangunan. Justru, dalam perekonomian ekonomi yang cepat akan memberi dampak pada ketimpangan dan distribusi pendapatan, karena sejatinya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan. Ada semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Dalam suatu pembangunan ekonomi yang lebih ditujukan pada pemerataan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi akan memakan waktu yang relatif lebih lama untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Dengan adanya perbedaan penyaluran pendapatan, yang mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan produktivitas setiap individu/kelompok/daerah, yang mana setiap individu/kelompok/daerah memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari individu/kelompok/daerah yang lain. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing individu/kelompok/daerah yang berbeda serta pembangunan yang cenderung terpusat hanya pada daerah-daerah yang maju. Sehingga hal ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan ini semakin melebar (Nurlina, 2017). Ketimpangan distribusi pendapatan salah satunya juga dapat dipengaruhi oleh nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto juga semakin tinggi (Sofia, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, Produk Domestik Regional Bruto DI.Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahunan Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto DI. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahunan Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Laju Pertumbuhan DI. Yogyakarta 2010 – 2016

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2010	64.678.968,20	4,64
2011	68.049.874,44	5,21
2012	71.702.449,18	5,13
2013	75.627.449,59	5,47
2014	79.536.081,75	5,1
2015	83.474.440,55	4,95
2016	87.687.926,63	5,05

Sumber : *BPS Provinsi DI. Yogyakarta (Data diolah)*

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa DI. Yogyakarta memiliki PDRB yang terus meningkat tiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian dan pertumbuhan ekonomi DI. Yogyakarta setiap tahunnya semakin membaik. Dengan semakin membaiknya perekonomian, maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat PDRB daerah maka semakin sejahtera penduduknya sehingga pendapatan tinggi dan merata antar daerah akan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Nurlina (2017), suatu pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dapat diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan (*at constant price inflation factor*) sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro. Namun dari hal tersebut, ternyata DI. Yogyakarta masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi menurut

provinsi. Sulitnya mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, disebabkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang menikmati hasil dari pendapatan masyarakat. Sedangkan sisanya masih belum merasakan dampak dari kenaikan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan suatu permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan oleh daerah. Karena dampak yang akan terjadi bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga bisa dari segi sosial. Terjadinya kesenjangan sosial. Sejalan dengan teori Neo Marxist yang apabila terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi namun pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin (Arif dan Rossy, 2017). Jika dikaitkan dengan hal tersebut, pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut dan dapat pula meningkatkan adanya ketimpangan pendapatan dalam daerah. Sebuah ketimpangan dalam suatu daerah sudah menjadi masalah klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Maka dari itu, ketimpangan ini bukan sesuatu yang dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sedikit demi sedikit sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar terjadi keselarasan dalam hal tersebut sehingga tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Linggar, 2011). Kemiskinan yang terjadi di DI. Yogyakarta ini akibat pesatnya “pembangunan yang dipaksakan” yang terjadi. Sehingga pembangunan dilakukan tanpa adanya perhitungan yang matang. Hasilnya, terjadinya capital flight, keuntungan hanya dinikmati investor yang entah dibawa kemana (Tempo.co, 25 Mei 2017).

Sedangkan dari Tabel 1.2 diketahui nilai rasio gini DI. Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Menurut data yang terbaru, DI. Yogyakarta merupakan provinsi peringkat pertama yang memiliki tingkat rasio gini tertinggi di Indonesia sebesar 0,441 pada Maret 2018. Bahkan rasio gini DI. Yogyakarta diatas angka tingkat ketimpangan nasional yang sebesar 0,389 pada Maret 2018

(Katadata.co.id, 18 Juli 2018). Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di suatu daerah dapat diketahui menggunakan ratio gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Rasio gini kecil lebih kecil dari 0,4 menunjukkan ketimpangan rendah, nilai 0,4 – 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi (Sofia, 2018).

Tabel 1.2 Nilai Indeks Gini DI. Yogyakarta Tahun 2010 – 2016

Tahun	Indeks Gini
2010	0,41
2011	0,41
2012	0,44
2013	0,43
2014	0,43
2015	0,43
2016	0,42

Sumber: *BPS Provinsi DI. Yogyakarta, 2018*

Kaitannya dengan ketimpangan, indeks gini merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks gini ini terdiri dari nilai 0 hingga 1. Jika indeks gini=0, maka ketimpangan pendapatan merata sempurna, yang artinya setiap orang sudah menerima pendapatan dengan jumlah yang sama. Sedangkan jika indeks gini=1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau dengan kata lain, pendapatan hanya diterima oleh satu orang ataupun satu kelompok saja.

Ahli ekonomi Kuznets dan Kaldor yang menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mencapai suatu peningkatan perekonomiannya. Semakin tinggi ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu negara, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik ialah menjaga agar distribusi pendapatan setimpang mungkin. Dengan demikian, menunjukkan adanya *trade-off* atau

pilihan antara pertumbuhan PDRB yang cepat tetapi tingkat distribusi pendapatan semakin timpang (Devi, 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari tingkat PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat PDRB terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DI. Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

1. Memberi sumbangan gagasan baru bagi peneliti lain dalam aspek-aspek yang menyangkut dengan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah.
2. Memberi pijakan atau referensi pada peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah dan menjadi kajian lebih lanjut.

Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui serta sebagai bahan tambahan pengetahuan.
2. Bagi mahasiswa, masyarakat dan peneliti lain, penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan serta dapat membantu dalam menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

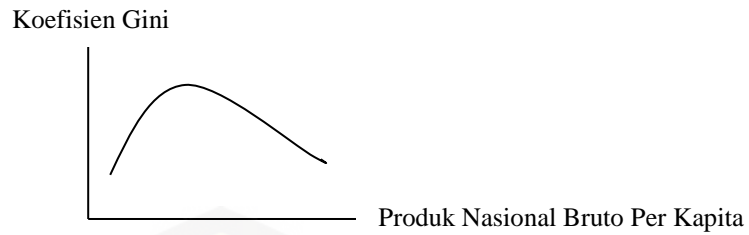
Tinjauan pustaka berisi tentang literatur yang digunakan dalam membahas permasalahan dalam penelitian. Yang terdiri dari landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dan juga landasan empiris atau penelitian-penelitian sebelumnya yang merupakan studi literatur dari berbagai penelitian peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu bentuk kerangka berfikir baik secara teoritis maupun empiris yang digunakan sebagai acuan informasi dan data dalam melakukan suatu penelitian.

2.1.1 Teori Ketimpangan

Ketimpangan antar daerah merupakan suatu permasalahan yang umum terjadi di dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan antar daerah ini dapat terjadi karena perbedaan dalam tersedianya sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi antar daerah. Yang mana dalam hal ini terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North. Menurutnya, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga mencapai titik puncak ketimpangan. Kemudian bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur tingkat ketimpangan akan menurun. Hal ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi sebaliknya. Hal ini juga diikuti oleh Kuznet yang mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan terus naik, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan naik secara berangsur-angsur. Hal ini yang sering disebut sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik". Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang rendah sampai pada suatu titik tertentu kemudian mengalami penurunan.



Gambar 2.1 Kurva Kuznet “U-Terbalik”

Diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok berpendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern.

2.1.1.1 Ukuran Ketimpangan

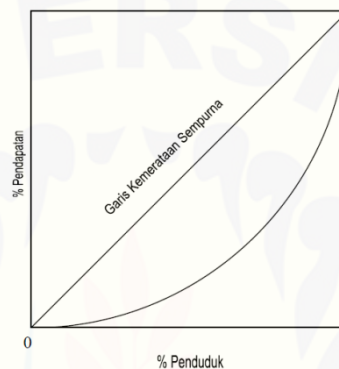
1. Size Distribution

Hasil pengukuran ini diperoleh dari menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selain itu juga bisa dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang yang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya. Tingkat-tingkat ketimpangan menurut pengukuran ini yang pertama, tingkat ketimpangan berat yaitu apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Kedua, tingkat ketimpangan sedang yaitu apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12 – 17 persen dari pendapatan nasional dan terakhir, tingkat ketimpangan ringan yaitu apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan gambaran suatu distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan-kalangan masyarakat yang dijelaskan secara kumulatif juga. Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa pendapatan mereka. Kurva ini terletak pada sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional dan sisi

datarnya melambangkan persentase kumulatif penduduk. Pada diagonal utama bujur sangkar merupakan kurva tersebut. Yang mana, bila kurva Lorenz semakin dekat dengan diagonal atau semakin lurus, maka dikatakan distribusi pendapatan nasional semakin merata. Dengan kata lain, garis diagonal merupakan garis “pemerataan sempurna”. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin menjauh dengan diagonal atau semakin melengkung, maka dikatakan distribusi pendapatan nasional tidak merata.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Ketidaksetaraan distribusi pendapatan tampaknya endogen terhadap proses pengembangan. Bahkan, pertama kali, pembangunan cenderung meningkatkan ketidaksetaraan, tetapi di luar batas tertentu, tren terbalik, ketidaksetaraan menstabilkan, kemudian menurun hingga mencapai tingkat terendah yang dapat dilihat di ekonomi industri (Nasfi, 2014).

Negara-negara yang memiliki ketimpangan tinggi koefisien Gini nya berkisar antara 0,50 sampai 0,70. Sedangkan untuk negara yang memiliki ketimpangan yang relative rendah atau bahkan merata koefisien Gini nya berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Rasio Gini juga dapat diukur dengan cara matematis, yaitu dengan rumus :

$$G = \sum (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

$$0 > G > 1$$

$$G = \sum f_i (Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana :

G = Rasio gini

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas-i

X_i = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga kelas-i

Y_i = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan kelas-i

3. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indeks yang menjelaskan kadar pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional yang angkanya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, maka semakin baik atau merata distribusi pendapatan yang terjadi. Sebaliknya, jika koefisien semakin besar (semakin mendekati satu), maka semakin buruk atau tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi. Kasus terparah dari suatu ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah jika terdapat seseorang yang menerima seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lain sama sekali tidak mendapat pendapatan, jika diperlihatkan dengan kurva Lorenz yang berimpit dengan sumbu horizontal dan sumbu vertikal kanan. Maka dari itu, tidak ada satu negara pun bisa memperlihatkan pemerataan sempurna ataupun ketimpangan sempurna dalam distribusi pendapatan, sehingga dalam kenyataannya kurva Lorenz dari setiap negara akan selalu berada pada sebelah kanan diagonal.

2.1.1.2 Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Adelman dan Morris (1973) mengatakan ada delapan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan di negara berkembang, yaitu :

1. Terus meningkatnya jumlah penduduk sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan per kapita,
2. Terus meningkatnya pendapatan uang tetapi tidak diikuti dengan penambahan produksi barang-barang (inflasi),
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah,
4. Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah,
5. Mobilitas sosial yang rendah,

6. Aturan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis,
7. Ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, dan
8. Industri-industri kerajinan rakyat akan kalah saing dan gagal (Faisal, 2018).

2.1.2 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah sebuah konsep mengenai penyebaran pendapatan setiap orang di dalam lingkungan masyarakat. Dalam distribusi pendapatan ini terdapat dua konsep pokok pengukuran, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut adalah konsep pengukuran distribusi pendapatan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep ketimpangan relatif adalah konsep pengukuran distribusi pendapatan dengan cara membandingkan pendapatan yang diterima seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan sebanyak faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga, pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang. Dalam proses produksi, masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima imbalan jasa sebagai berikut :

1. Pemilik faktor sumber alam berupa tanah akan menerima sewa tanah,
2. Pemilik faktor tenaga kerja akan menerima upah kerja,
3. Pemilik modal akan menerima bunga modal, dan
4. Pengusaha akan menerima laba usaha.

Melalui proses produksi yang ada pada masing-masing penyedia faktor produksi akan menerima bagian dan distribusi pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing penyedia faktor produksi tergantung pada besar kecilnya jasa yang disumbangkan dalam proses produksi. Distribusi pendapatan ditinjau dari sistem perekonomian dibagi menjadi tiga macam yaitu, sebagai berikut :

1. distribusi pendapatan sistem liberalis

yaitu pembagian pendapatan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur,

2. distribusi pendapatan sistem sosialis

yaitu pembagian pendapatan bagi masyarakat yang ditentukan oleh pihak pemerintah, dan

3. distribusi pendapatan sistem campuran

yaitu pendistribusian yang ditentukan berdasarkan mekanisme di pasar dan oleh pemerintah.

Masalah distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Tiffany, 2016).

Teori Keynesian mengemukakan peranan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pihak yang kekurangan dan tentunya mutlak diperlukan pula kebijakan pemerintah dalam upaya redistribusi pendapatan. Yang mana dengan adanya hal ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Dikarenakan, jika dilihat dari teori konsumsi Keynes, "Pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang

maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol". Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian subsidi pada pihak yang kekurangan otomatis akan memberi pendapatan pada pihak tersebut. Sehingga, dengan adanya tambahan pendapatan, pihak tersebut akan cenderung meningkatkan jumlah konsumsinya sesuai dengan tambahan pendapatannya. Yang mana, dengan bertambahnya jumlah konsumsi akan memberi pengaruh pada perekonomian.

Perekonomian akan semakin meningkat dan hal ini pun akan memberi dampak pada pembangunan serta pendistribusian pendapatan di wilayah tersebut. Selain itu, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut (Lulus, 2006). Perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat perekonomiannya meningkat atau lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi sendiri menjelaskan mengenai faktor-faktor yang akan menentukan bagaimana jalannya pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan perubahan jangka panjang yang secara perlahan melalui kenaikan tabungan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill maupun ekonomi menurut pandangan neo klasik seperti Robert Solow dan Trevor Swan mengatakan bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah :

1. Jumlah penduduk,

2. Jumlah stok barang modal,
3. Luas tanah dan kekayaan alam, dan
4. Tingkat teknologi yang digunakan

Namun, dalam dunia modern sumber daya alam tidak menjadi keharusan dalam keberhasilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh teori neo klasik yang lebih menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta tingkat teknologi yang digunakan. Maka dari itu, mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti peran pemerintah yang menjadi kajian menarik untuk dikaji lebih awal. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih kecil ataupun lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Dalam meningkatkan pendapatan per kapita suatu daerah, upaya yang dilakukan harus melibatkan berbagai faktor produksi yang meliputi sumber-sumber ekonomi yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, kapital, faktor sosial dan teknologi dalam setiap kegiatan produksi. Kualitas pertumbuhan ekonomi dikatakan baik jika tidak dihantui tiga persoalan salah satunya ketimpangan. Hasil pertumbuhan ekonomi jika tidak didistribusikan secara merata, akan timbul ketimpangan pendapatan. Pendapat Rostow dalam menekankan sifat alami sebuah pembangunan diibaratkan melalui sebuah pesawat terbang yang bergerak di lintasan hingga lepas landas dan akhirnya terbang di angkasa, pertumbuhan ekonomi di jelaskan dalam 5 tahap seperti berikut :

1. Masyarakat tradisional (traditional society),
2. Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off),
3. Tinggal landas (the take-off),
4. Menuju kekedewasaan (the drive to maturity),
5. Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption).

Dalam menghitung sebuah kemajuan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah memerlukan alat ukur yang tepat, diantaranya :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tingkat regional yaitu jumlah hasil barang produksi ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian

dalam kurun waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDB ataupun PDRB merupakan suatu alat ukur yang bersifat global, meskipun alat ukur ini merupakan alat ukur yang taidak sesuai karena masih tidak dapat mensejahterahkan penduduk yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di suatu daerah tersebut.

2. Produk Domestik Perkapita/Pendapatan Perkapita

Dalam Produk Domestik Perkapita/Pendapatan Perkapita ini dinilai merupakan suatu alat ukur yang tepat untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah karena dapat menjelaskan kesejahteraan penduduk melalui nilai PDB atau nilai PDRB saja. Produk Domestik Bruto Perkapita di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata. Kemakmuran suatu daerah selain dengan ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang terjadi, juga dilihat dari seberapa besar *transfer payment* pada bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah ataupun mendapat aliran dana dari luar wilayah.

2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang dimana antar pemerintah daerah dengan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta sehingga menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi.

Selama ini yang menjadi perhatian dalam perekonomian adalah bagaimana upaya dalam mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Dan tentunya, banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan perekonomian tersebut, dan hal ini lah yang terkadang menjadi permasalahan yang dalam terciptanya perekonomian yang lebih baik di suatu negara. Di dalam pembangunan ekonomi daerah teori ekonomi Neo klasik terdapat 2 konsep pokok yaitu :

1. Keseimbangan (equilibrium), dan
2. Mobilitas faktor produksi.

Yang maksudnya, dalam sistem perekonomian akan terjadi suatu keseimbangan jika modal dalam mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Dengan demikian, modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi menuju daerah yang memiliki upah yang relatif rendah. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional, yang dapat menciptakan perubahan besar. Baik dalam perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau bahkan menghapus tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa sasaran dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Dipenuhinya sandang, pangan dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan,
2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa publik, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain-lain,
3. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif,
4. Terbinanya sarana dan prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan untuk kebutuhan rumah tangga, dan
5. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek.

2.1.5 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan

2.1.5.1 Produk Domestik Regional Bruto

Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara ada dua indikator yaitu PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional. Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto merupakan hasil dari semua nilai barang dan jasa akhir yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah PDRB sendiri terdiri dari empat kata, yang pertama kata produk, yang berarti semua hasil produksi baik barang ataupun jasa. Yang kedua kata domestik, yang berarti perhitungan nilai

produksi dari hasil faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik yang tidak peduli faktor produksi tersebut itu dikuasai oleh penduduk atau bukan. Yang ketiga kata regional, yang berarti perhitungan dari nilai produksi yang hanya dihasilkan dari penduduk tanpa melihat apakah faktor produksi yang digunakan ada dalam wilayah domestik ataupun bukan. Yang keempat kata bruto, yang berarti total dari nilai produksi namun masih mengandung biaya penyusutan jadi seringkali disebut sebagai nilai produksi kotor (Yayuk dan Zamzami, 2014).

Hasil PDRB merupakan sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui jumlah dan tingkat dari PDRB, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun bisa diketahui. Semakin sejahtera masyarakat di suatu wilayah makin tinggi tingkat PDRB nya. Yang mana, dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat berarti semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Namun, hal itu bukan menjadi patokan dalam menilai ketimpangan ekonomi. Dalam penyajian PDRB, ada dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. Dalam PDRB atas dasar harga berlaku, menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga dengan tahun berjalan. Dalam PDRB atas dasar harga berlaku kita dapat mengetahui bagaimana kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan, menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai patokan tahun dasar. Dalam PDRB atas harga konstan kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian daerah dari tahun ke tahun secara riil atau dengan kata lain untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Robinson, 2005:21).

Perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang didapatkan dari berbagai unit produksi yang berada dalam suatu wilayah atau provinsi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Dalam pendekatan produksi, unit-unit produksi terbagi menjadi 9 sektor atau lapangan

usaha yaitu : 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 5. Konstruksi, 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7. Pengangkutan dan Komunikasi, 8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, 9. Jasa- Jasa (setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor).

2. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan produksi, PDRB merupakan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut mengambil andil dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. Balas jasa dalam pendekatan ini bisa berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan sebelum dibayar dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung yang lain, termasuk juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi). Dan jumlah seluruh komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral.

3. Pendekatan Pengeluaran

Dalam pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan seluruh komponen permintaan akhir yang terdiri dari : 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba, 2. Konsumsi Pemerintah, 3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, 4. Perubahan Inventori dan 5. Ekspor Neto (ekspor dikurangi neto).

Secara konsep, ketiga pendekatan ini akan memiliki hasil akhir yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor produksi.

2.1.5.2 Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan saat ini telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya, kemiskinan bukan lagi hanya dianggap sebagai faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Selain itu, kemiskinan juga disebut sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup lebih layak. Kemiskinan biasanya didefinisikan dari pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non material yang diperoleh seseorang tersebut. Menurut Nurkse (1961), menjelaskan tentang

bagaimana kemiskinan yang menjelma menjadi lingkaran setan menguasai masyarakat miskin. Tingkat pendapatan riil yang lemah menyebabkan kemampuan menabung dan kapasitas modal untuk investasi menjadi rendah sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas dan menyebabkan tingkat pendapatan menjadi lemah pula. Dan proses-proses melingkar itulah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan jika tidak ada bantuan dari luar. Terdapat dua paradigma atau teori besar dalam memahami kemiskinan, yaitu Neo-Liberal dan Sosial Demokrat (Restu, 2015).

1. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan individual bukan lagi permasalahan kelompok. Yang mana hal ini disebabkan kelemahan individu dalam memilih pilihan hidup individu yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan pasar memiliki andil besar dalam kemiskinan. Dengan meningkatkan dan memperluas kekuatan-kekuatan pasar juga dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlahan kemiskinan akan jauh berkurang.

2. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Lain dengan teori paradigma Neo-Liberal, teori paradigma Sosial Deomokrat ini menjelaskan bahwa kemiskinan bukan lagi permasalahan individu, melainkan permasalahan struktural. Selain itu, kemiskinan yang terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang diakibatkan dari terbatasnya pemenuhan akses golongan masyarakat tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Dalam teori ini, sebuah kesetaraan dan keadilan menjadi faktor penting untuk menghindari kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat pun akan memperoleh kemandirian dan kebebasan.

Ditinjau dari segi kebijakan, kemiskinan terdiri dari dua aspek, yaitu aspek primer dan sekunder. Kemiskinan aspek primer menjelaskan bahwa seseorang tersebut miskin akan asset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kemiskinan aspek sekunder menjelaskan bahwa seseorang tersebut miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sedangkan jika ditinjau dari secara konseptual, kemiskinan bisa dilihat dari berbagai segi.

Yang pertama segi subsisten, yang mana penghasilan dari seseorang tersebut hanya cukup untuk kebutuhan makan saja, bahkan sudah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Yang kedua segi ketidakmerataan, yang mana posisi tingkat kemiskinannya dilihat dari posisi golongan menurut penghasilannya. Yang ketiga segi eksternal, yang mana segi ini mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Dari sisi pandangan ekonomi, faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi tiga faktor. Yang pertama, kemiskinan muncul karena pendapatan yang tidak merata karena penduduk miskin rata-rata hanya memiliki sumber daya hanya sedikit. Yang kedua, kemiskinan muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, yang maksudnya dalam hal keterampilan dalam bidang-bidang tertentu, karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan diskriminasi karena faktor keturunan. Dan yang ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dan modal dalam masyarakat. Selain itu, ada 3 hal untuk mengukur kemiskinan, diantaranya :

1. Kemiskinan Absolut

Merupakan kemiskinan yang terjadi karena kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya (sandang, papan dan pangan).

2. Kemiskinan Relatif

Merupakan kemiskinan yang sebenarnya, hidup diatas garis kemiskinan namun masih dibawah kemampuan hidup masyarakat di lingkungannya.

3. Kemiskinan Kultural

Merupakan kemiskinan yang sikap dari seseorang yang tidak mau berusaha untuk berubah demi memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada bantuan usaha dari pihak yang ingin membantunya (Risno, 2017).

2.1.5.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) pembangunan manusia merupakan proses untuk manusia menentukan dan mengembangkan pilihan-pilihannya. Pengertian IPM ini dikeluarkan oleh UNDP sebagai salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini

mulai digunakan pada tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Selain itu, indeks pembangunan manusia adalah sebuah alat ukur dalam membandingkan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup seseorang dan juga indeks pembangunan digunakan untuk mengklasifikasikan tingkatan sebuah negara, negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Dan mengukur bagaimana pengaruh dari kebijakan ekonomi yang sudah dilaksanakan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut UNDP terdapat empat hal pokok dalam mencapai tujuan pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

1. Produktivitas

Masyarakat diharapkan mampu untuk berpartisipasi dan membantu dalam meningkatkan produktifitas. Sehingga proses penciptaan pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan bantuan dari semua pihak. Dan pembangunan ekonomi merupakan himpunan dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Dalam mengakses sumber daya ekonomi maupun sosial setiap masyarakat wajib memiliki kesempatan yang sama. Tidak boleh ada larangan atau hambatan dalam hal tersebut, jika pun ada, harus dihapus secepatnya, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan produktifitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Kesinambungan

Lanjutan pada poin kedua bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi maupun sosial harus dipastikan bukan hanya untuk generasi saat ini, melainkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan sumber daya yang sudah dimanfaatkan, seperti sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus tetap selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Dalam hal ini masyarakat wajib berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka, serta berpartisipasi dan berhak

menerima manfaat dari proses pembangunan negara. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM terbentuk dari tiga pendekatan dimensi dasar, yaitu umur yang panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Dari hal tersebut, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka umur harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Terakhir, untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Berikut penjelasan untuk masing-masing alat ukur dimensi :

1. Indeks Harapan Hidup (Angka Harapan Hidup)

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini, digunakan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, dengan harapan variabel tersebut bisa menjelaskan rata-rata lama hidup dan hidup sehat masyarakat. Namun, sulitnya untuk mendapat informasi orang yang sudah meninggal dalam kurun waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung. Dalam perhitungan metode tidak langsung digunakan dua jenis data, yaitu angka anak lahir hidup dan anak masih hidup dari wanita pernah kawin.

2. Indeks Pendidikan (Indikator Angka Melek Huruf & Rata-Rata Lama Sekolah)

Indeks Pendidikan dihitung dengan dua indikator, yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Penduduk dengan umur 15 tahun keatas menjadi populasi yang digunakan karena pada kenyataannya penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah, sehingga batasan 15 tahun ini sesuai dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dua indikator dalam indeks pendidikan ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (angka LIT). Yang mana LIT adalah proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan MYS adalah gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak (Kemampuan Daya Beli)

Dalam mengukur standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan real per kapita GDP *adjusted* sebagai indikator. Sedangkan untuk menghitung IPM

sub nasional (kabupaten/kota atau provinsi) tidak memakai PDRB per kapita, karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak menggambarkan daya beli riil masyarakat yang merupakan kunci dari perhitungan IPM. Dan untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang sudah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan PPP (*Purchasing Power Parity*)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah membahas mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan dalam suatu wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya, diantaranya :

Lulus Prapti NSS (2006) yang berjudul “Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000 – 2004)”. Dengan menggunakan alat analisis metode data panel, penelitian ini memperoleh hasil bahwa meskipun tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah relatif rendah, namun keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Linggar Dewangga Putra dan Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007”. Dengan menggunakan alat analisis Indeks Gini, Indeks Williamson dan Regresi Linier Berganda, penelitian ini memperoleh hasil bahwa Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan pendapatan dari distribusi pendapatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan indeks Gini (dengan nilai 0,477). Maka bisa disimpulkan yang lebih berpengaruh adalah indeks Williamson daripada Indeks Gini.

Nasfi Fkili Wahiba and Malek El Weriemmi (2014) yang berjudul “The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality (Tunisia)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Tunisia. Dengan menggunakan alat analisis Kurva Kuzntes, Pendekatan Grafis dan Analisis Ekonometrika, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan merupakan faktor yang memberatkan ketimpangan yang juga ditekan dengan proses percepatan liberalisasi perdagangan di negara ini. Sumber daya manusia dan pengembangan keuangan tampaknya telah berkontribusi pada penyelesaian masalah ini. Lalu, ditemukan bahwa ketidaksetaraan memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi dan efek ini muncul lebih banyak setelah percepatan proses keterbukaan terjadi.

Shofia Taharah (2016) yang berjudul “Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015”. Dengan menggunakan alat analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel, penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel indeks pembangunan manusia, PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2009 - 2015.

Tiffany Kalalo, Daisy S. M. Engka dan Mauna Th. B. Maramis (2016) yang berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara”. Dengan menggunakan alat analisis Index Gini dan Kurva Lorenz, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pendistribusian pendapatan dengan tingkat pendistribusian pendapatan lebih merata berada pada golongan pekerjaan pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan paling kecil diterima oleh golongan pekerjaan petani dan buruh dimana terjadi distribusi pendapatan yang timpang.

Nurlina, dan T.Muhammad Iqbal Chaira (2017) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh”. Dengan menggunakan alat analisis metode regresi linier sederhana, penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks gini yaitu pertumbuhan ekonomi menjadikan distribusi pendapatan menjadi merata di Provinsi Aceh.

Muhammad Arif, Rossy Agustin Wicaksana (2017) yang berjudul “Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Dengan menggunakan alat analisis regresi data panel yaitu bahwa Random Effect Model (REM), penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.

Ferdinand Niyimbanira (2017) yang berjudul “Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi di Afrika Selatan, khususnya di Provinsi Mpumalanga. Dengan menggunakan alat analisis Indeks Gini dan Metode Data Panel, penelitian ini memperoleh hasil bahwa jika adanya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan tersebut hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sekitar 64% perubahan ketimpangan pendapatan dan sekitar 63% perubahan dalam kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi provinsi Mpumalanga. Afrika Selatan tampaknya memerlukan sebuah model pembangunan sosio-ekonomi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

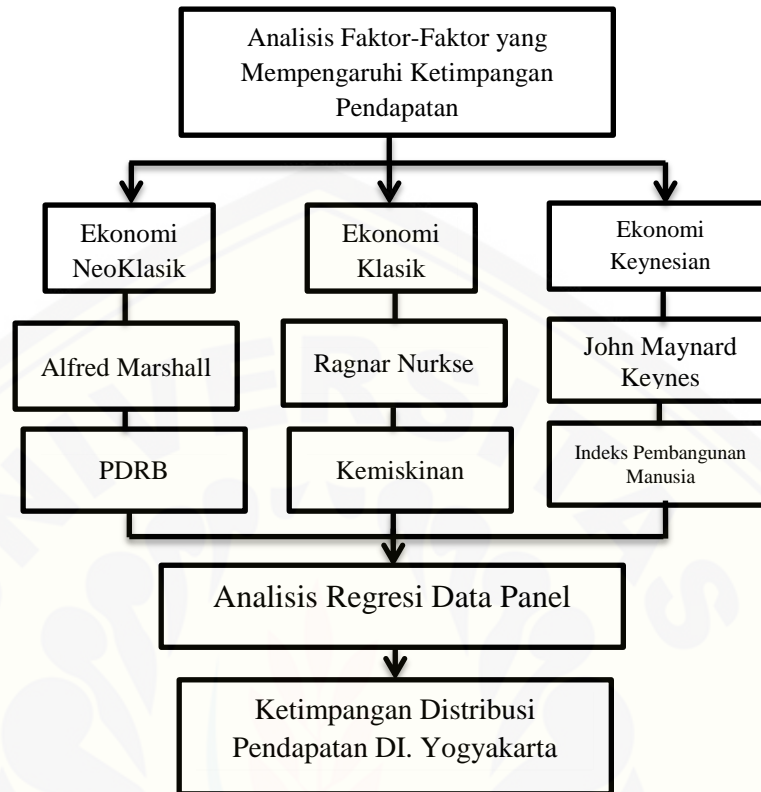
No	Nama Peneliti	Judul	Alat Analisis	Variabel	Hasil
1.	Lulus Prapti NSS (2006)	Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000 – 2004)	Metode data panel	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Meskipun tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah relatif rendah, namun keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2.	Linggar Dewangga Putra dan Achma Hendra Setiawan, S.E, M.Si (2011)	Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007	Indeks Gini, Indeks Williamson dan Regresi Linier Berganda	Pendapatan Masyarakat dan Tingkat Kemiskinan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan pendapatan dari distribusi pendapatan yang diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan indeks Gini (dengan nilai 0,477). Maka bisa disimpulkan yang lebih berpengaruh adalah Indeks Williamson daripada Indeks Gini.

3. Nasfi Fkili Wahiba and Malek El Weriemmi (2014)	The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality (Tunisia)	Kurva Kuzntes, Pendekatan Grafis dan Analisis Ekonometrika	Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan merupakan faktor yang memberatkan ketimpangan yang juga ditekan dengan proses percepatan liberalisasi perdagangan di negara ini. Sumber daya manusia dan pengembangan keuangan tampaknya telah berkontribusi pada penyelesaian masalah ini. Lalu, ditemukan bahwa ketidaksetaraan memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi dan efek ini muncul lebih banyak setelah percepatan proses keterbukaan terjadi.
4. Shofia Taharah (2016)	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2015	Analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel	Pembangunan manusia, PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum	Variabel indeks pembangunan manusia, PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2009 – 2015

5. Tiffany Kalalo, Daisy S. M. Engka dan Mauna Th. B. Maramis (2016)	Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara	Index Gini dan Kurva Lorenz	Pendapatan masyarakat dan Jumlah Masyarakat	Pendistribusian pendapatan dengan tingkat pendistribusian pendapatan lebih merata berada pada golongan pekerjaan pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS) dengan paling kecil diterima oleh golongan pekerjaan petani dan buruh dimana terjadi distribusi pendapatan yang timpang.
6. Nurlina, dan T.Muhammad Iqbal Chaira (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh	Metode regresi linier sederhana	Pendapatan dan Jumlah Penduduk	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks gini yaitu pertumbuhan ekonomi menjadikan distribusi pendapatan menjadi merata di Provinsi Aceh.
7. Muhammad Arif, Rossy Agustin Wicaksani (2017)	Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Analisis regresi data panel yaitu bahwa Random Effect Model (REM)	IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan jumlah penduduk	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif

8. Ferdinand Niyimbanira (2017)	Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province	Indeks Gini dan Metode Data Panel	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan	Jika adanya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan tersebut hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sekitar 64% perubahan ketimpangan pendapatan dan sekitar 63% perubahan dalam kemiskinan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi provinsi Mpumalanga Afrika Selatan tampaknya memerlukan sebuah model pembangunan sosio-ekonomi yang kuat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
---------------------------------	---	-----------------------------------	--	--

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual adalah bentuk dari uraian pemikiran yang diringkas dengan maksud agar pembaca lebih mudah dalam mengerti makna dan tujuan dalam penelitian yang ditulis.

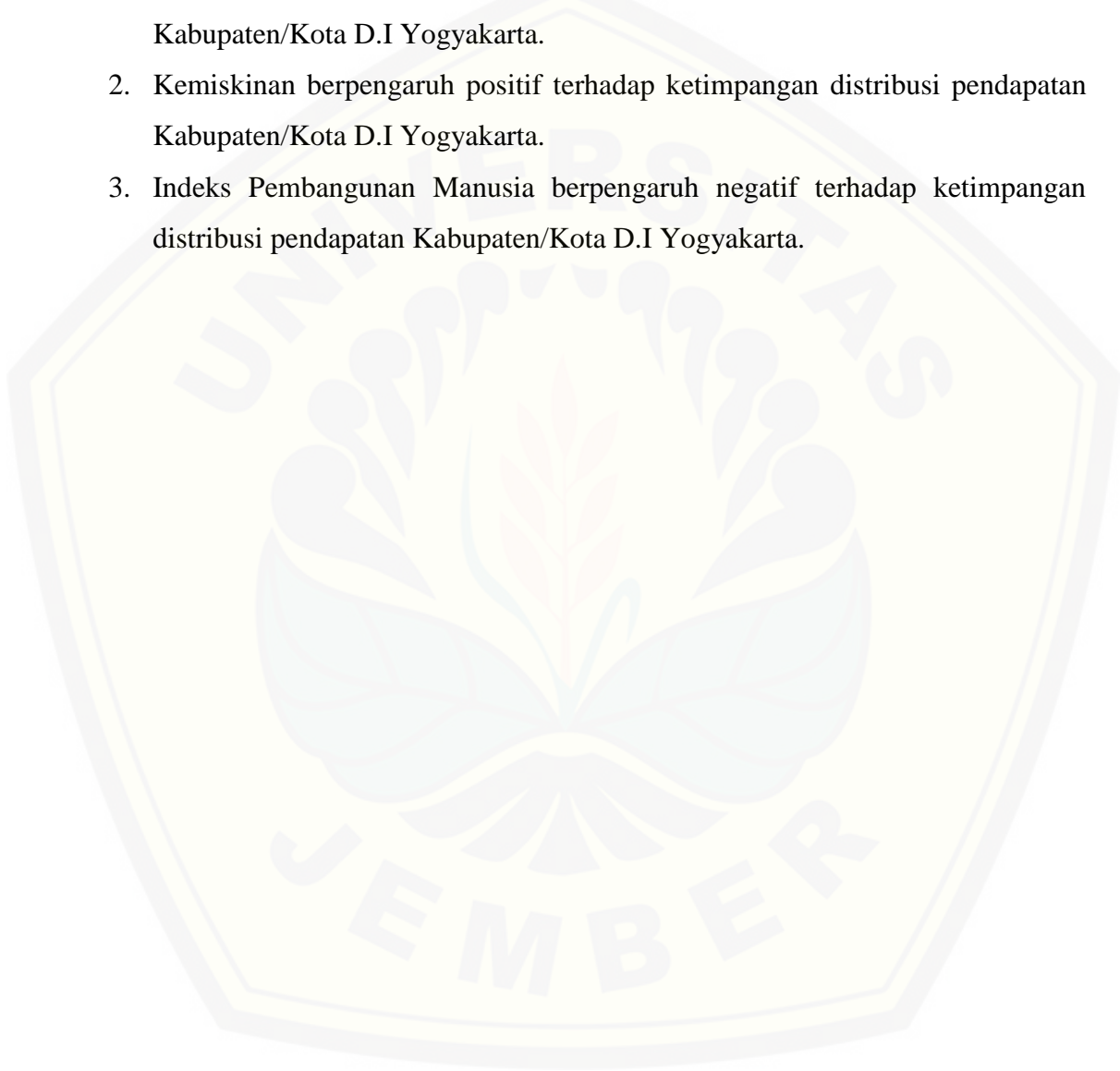
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini harus lebih tinggi dari kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk, hal ini juga tak lepas dari pengaruh berbagai factor seperti tenaga kerja, kapital, sumber daya alam dan teknologi. Namun menurut Kuznet dan Kaldor, selain faktor-faktor diatas, ada faktor lain yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yaitu distribusi pendapatan di dalam masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan di masyarakat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, yang berjudul "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta" berfokus pada bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi akibat pengaruh

dari tingkat PDRB, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di provinsi DI. Yogyakarta.

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta.
2. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta.
3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta.



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam rancangan penelitian, terdapat rencana kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan dengan baik, benar dan lancar sesuai dengan harapan penulis.

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang mana dalam penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh perkembangan dan perubahan pertumbuhan ekonomi di DI. Yogyakarta yang dipengaruhi oleh tingkat distribusi pendapatan. Penelitian deskriptif ini merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis dan menemukan jawaban yang menyangkut dengan rumusan masalah penelitian ini.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi DI. Yogyakarta. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh tingkat distribusi pendapatan khususnya ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data-data sekunder ini merupakan data yang diambil dari tahun 2010 – 2016. Tempat penelitian ini di DI. Yogyakarta dikarenakan selain memiliki perekonomian yang cukup tinggi, DI. Yogyakarta ternyata masih memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi berdasarkan Badan Pusat Statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data sekunder, yang mana data yang akan dipergunakan adalah penggabungan dari deret waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 5 data kabupaten/kota di DI. Yogyakarta. Data diperoleh dari berbagai sumber antara lain data BPS DI. Yogyakarta dan dinas-dinas lain yang terkait dalam wilayah DI. Yogyakarta.

3.3 Analisis Regresi Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi model data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data *time series* dan data *cross section*, maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = variabel dependen (Ketimpangan Distribusi Pendapatan)

X_{it} = variabel independen

β_1 = koefisien pengaruh PDRB

β_2 = koefisien pengaruh Kemiskinan

β_3 = koefisien pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

i = *cross section* (Kabupaten di DI. Yogyakarta)

t = *time series* (Tahun 2010 – 2016)

U_t = variabel pengganggu

Adapun 3 metode dalam melakukan regresi adalah sebagai berikut :

3.3.1 Metode Common Effect (CEM)

Metode *Common Effect* merupakan metode yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, maka kita bisa menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Diasumsikan bahwa perilaku data antara ruang sama dalam berbagai kurun waktu.

3.3.2 Metode Fixed Effect (FEM)

Metode Fixed Effect merupakan metode yang dimana salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda-beda pada setiap unit *cross section* tetapi masih mengasumsikan slope koefisien yang tetap.

3.3.3 Metode Random Effect (REM)

Metode ini memilih estimasi data panel dengan residual yang mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu, dengan mengasumsikan setiap kabupaten

memiliki intersep. Namun juga diasumsikan bahwa intersep adalah variabel random.

Dari ketiga metode tersebut, dalam menentukan model regresi data panel perlu dilakukan beberapa uji untuk menentukan metode pendekatan estimasi mana yang sesuai dan menghasilkan hasil regresi yang baik. Langkah yang pertama untuk menentukan model yang tepat adalah melakukan regresi dengan menggunakan regresi model CEM dan FEM yang selanjutnya dilanjutkan dengan test menggunakan uji Chow sehingga didapatkan hasil yang terbaik dari kedua model tersebut. Jika yang terbaik dari kedua model tersebut adalah model FEM, maka dilakukan test kembali dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model mana yang tepat antara FEM atau REM.

3.4 Uji Statistik

3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas dalam suatu model untuk menjelaskan variabel terikatnya. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1 maka model semakin baik. Untuk menghitung koefisien determinasi adalah :

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Residual}}{\text{Jumlah Kuadrat Total}}$$

3.4.2 Uji F

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau dengan kata lain bahwa model tersebut dapat diterima. Hipotesis yang diuji dari pendugaan persamaan adalah variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. Selain itu, Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebasnya secara serentak terhadap variabel terikatnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F. Apabila nilai prob $F <$ taraf signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob $F >$ taraf

signifikansi artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji F hipotesis yang di uji adalah:

$$H_0: b_1 = b_2 = b_3 = \dots = 0$$

$$H_1: \text{minimal ada salah satu } b_i \neq 0$$

Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai taraf nyata (α) yang di tetapkan dan nilai probabilitas F-statistiknya. Dari uji F tersebut dapat diketahui suatu model dapat diterima atau tidak.

Kriteria uji:

Probability F-Statistik < taraf nyata (α), maka tolak H_0

Probability F-Statistik > taraf nyata (α), maka terima H_0

Jika uji F tolak H_0 atau terima H_1 , maka dapat disimpulkan minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dan model yang digunakan dapat diterima. Sebaliknya jika dalam uji F terima H_0 atau tolak H_1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya dan model tidak layak digunakan.

3.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara parsial terhadap variabel terikatnya. Uji t dapat dilakukan dengan mambandingkan nilai probabilitas t. Apabila nilai probabilitas t < taraf signifikansi artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Apabila nilai prob. t > taraf signifikansi artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji satu arah :

$$H_0 : b_1 = b_2 \dots = b_i = 0$$

$$H_1 : b_i > 0 \text{ atau } b_i < 0$$

tolak H_0 jika $|t_{hit}| > t_\alpha$ artinya, variabel signifikan berpengaruh nyata pada taraf α .

Uji dua arah :

$$H_0 : b = b_2 \dots = b_i = 0$$

$$H_1 : \text{minimal ada salah satu } b_i \neq 0$$

tolak H_0 jika $|t_{hit}| > t_{\alpha/2}$ artinya variabel signifikan berpengaruh nyata pada taraf α .

3.5 Uji Asumsi Klasik

Yang akan dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah data yang diestimasi dengan regresi layak untuk digunakan dengan model atau tidak. Pengujian asumsi klasik antara lain :

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana terdapat korelasi linear diantara variabel bebas sebuah model. Jika dalam suatu model terdapat multikolinear akan menyebabkan nilai R^2 yang tinggi dan lebih banyak variabel bebas yang tidak signifikan dari pada variabel bebas yang signifikan atau bahkan tidak ada satupun. Masalah multikolinearitas dapat dilihat melalui *correlation matrix*, dimana batas tidak terjadi korelasi sesama variabel yaitu dengan uji Akar Unit sesama variabel bebas adalah tidak lebih dari $|0.80|$ (Devi, 2006). Melalui *correlation matrix* ini dapat pula digunakan Uji *Klein* dalam mendeteksi multikolinearitas. Apabila terdapat nilai korelasi yang lebih dari $|0.80|$, maka menurut uji *Klein* multikolinearitas dapat diabaikan selama nilai korelasi tersebut tidak melebihi nilai *R-squared* (Adj) atau R^2 -nya.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Kondisi heteroskedastisitas merupakan kondisi yang melanggar asumsi dari regresi linear klasik. Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian dari variabel bebas yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam linear klasik adalah mempunyai varian yang sama (konstan)/homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitasnya.

$$H_0 : \delta = 0$$

$$H_1 : \delta \neq 0$$

Kriteria uji

Probability < taraf nyata (α), maka terima H_0

Probability > taraf nyata (α), maka tolak H_0

Tolak H_0 maka persamaan tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Begitu sebaliknya, jika terima H_0 maka persamaan tersebut mengalami gejala heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan guna mengetahui model regresi penelitian yang digunakan apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan berbagai prosedur, salah satunya melalui eviews 9 dengan uji Jarque-Bera. Hasil uji dapat dilihat jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel-variabel yang dapat diukur. Selain itu, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y)

Merupakan ketidakmerataannya hasil pembangunan di suatu daerah atau negara baik yang diterima oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu dari kepemilikan faktor-faktor produksi yang dilihat dari nilai indeks gini DI. Yogyakarta dan kabupaten/kota pada tahun 2010 – 2016.

2. Produk Domestik Regional Bruto (X_1)

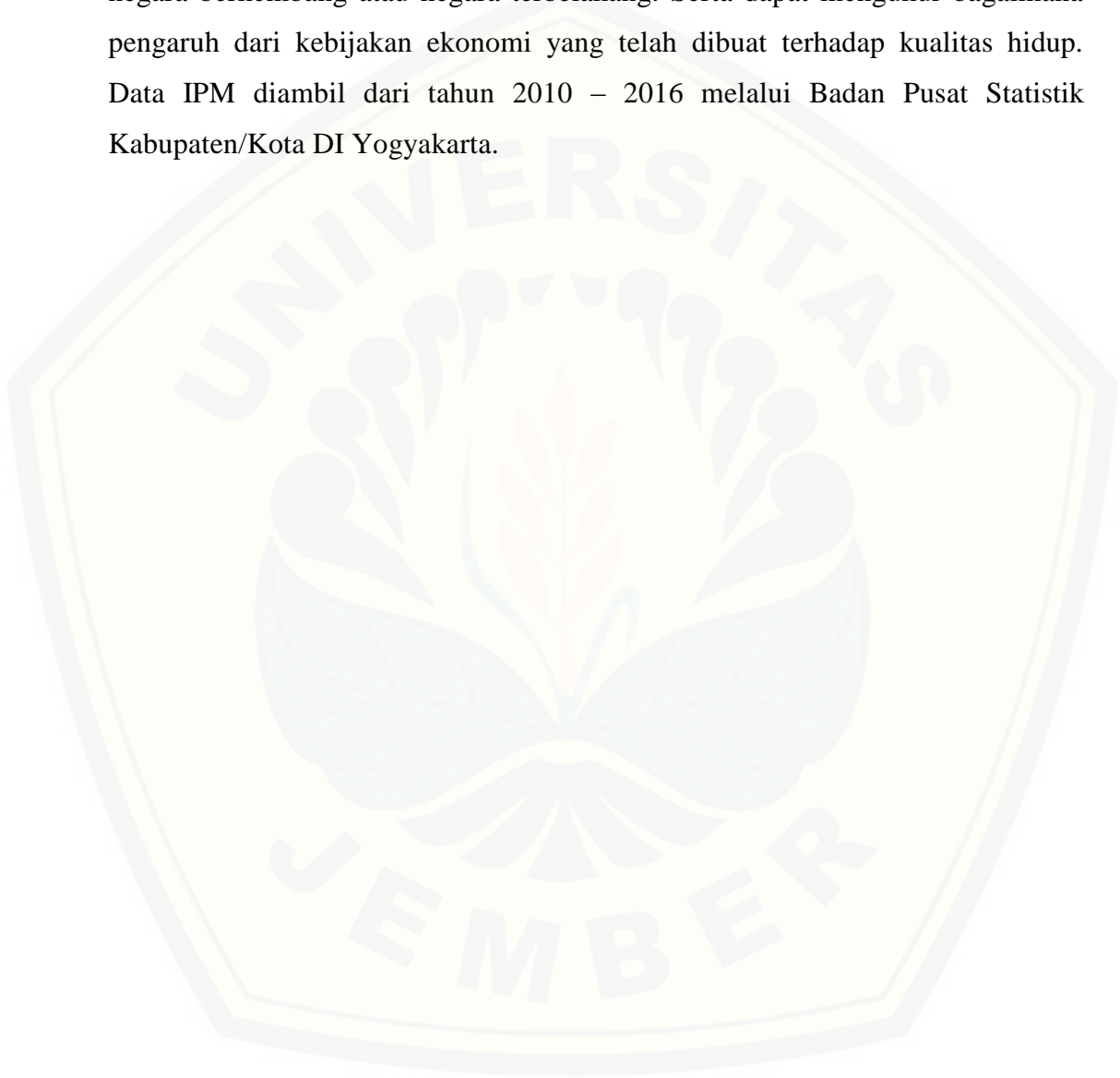
Menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang digunakan merupakan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2010 yang dinyatakan dalam milyar rupiah pada tahun 2010 – 2016.

3. Kemiskinan (X_2)

Merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, baik makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Data kemiskinan diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota DI Yogyakarta tahun 2010 – 2016.

4. Indeks Pembangunan Manusia (X_3)

Merupakan pengukuran perbandingan ukuran dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. Dari IPM ini kita dapat mengetahui bagaimana klasifikasi negara tertentu. Termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Serta dapat mengukur bagaimana pengaruh dari kebijakan ekonomi yang telah dibuat terhadap kualitas hidup. Data IPM diambil dari tahun 2010 – 2016 melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota DI Yogyakarta.



BAB V. PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian ini berdasarkan variabel Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia yang diuji dengan Uji Regresi Data Panel. Selain itu, penutup berisi saran dalam bentuk rekomendasi kebijakan dari penulis atas permasalahan terkait dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika PDRB mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan, yang berarti PDRB berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini bisa terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Selain itu, juga dapat diindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan tersebut hanya sedikit orang yang mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
2. Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Tingkat Kemiskinan mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengalami peningkatan, yang berarti Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini terjadi sama seperti poin PDRB, yang mana tidak semua masyarakat mendapatkan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga kemiskinan yang menjelma menjadi lingkaran setan akan terus berputar menguasai masyarakat miskin.

3. Tingkat IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, jika Tingkat IPM mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan, yang berarti Tingkat IPM berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini disebabkan pemerintah D.I Yogyakarta memusatkan kualitas pada setiap individu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat mendapat kesejahteraan yang merata, maka akan berpengaruh juga pada pemerataan distribusi pendapatan. Sehingga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dapat menurun.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat terus membuat program atau kebijakan untuk upaya menaikkan tingkat PDRB dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi melalui :
 - a. Mengembangkan kegiatan mandiri (UMKM), dan memberi pelatihan keterampilan (SDM) sehingga dapat mendirikan usaha mandiri. Yang mana kebijakan-kebijakan mengenai UMKM ini diatur dalam UU nomor 20 tahun 2008. Pada tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan bantuan berupa hibah kepada 2.500 wirausaha pemula (WP) skala mikro hingga Rp.12.000.000 untuk masing-masing WP dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Penyediaan dan pendampingan bantuan usaha, seperti memberi fasilitas dalam pemasaran produk mandiri masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam perekonomian daerah.
 - c. Memperluas akses infrastruktur yang memudahkan masyarakat dalam mendistribusikan produk mandirinya.
2. Badan pemerintah diharapkan lebih memaksimalkan hasil kebijakan atau program yang dinilai efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi, seperti penyaluran anggaran melalui beragam program pemerintah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (Bantuan pangan non-

tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan dan Kredit Usaha Rakyat.

3. Dengan ditemukannya hasil bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, pemerintah seharusnya menjadikan ini sebagai perhatian dalam upaya terus meningkatkan IPM. Dengan cara meningkatkan kinerja berbagai sektor diantaranya Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan per kapita. Dalam hal Pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar, dalam melalui Kesehatan yaitu program Kartu Indonesia Sehat dan dalam hal Pendapatan melalui program Rastrea, KUR dan sebagainya. Sehingga variabel IPM dapat terus membantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad., dan Rossy Agustin. 2017. Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal: The 6th University Research Colloquium 2017*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI. Yogyakarta. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia*. Provinsi DI. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI. Yogyakarta. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto DI. Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Jutaan Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2010*. Provinsi DI. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI. Yogyakarta. 2018. *Rasio Gini Tahun 2010 – 2018*. Provinsi DI. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI. Yogyakarta. 2018. *Rasio Gini Tahun 2010 – 2018*. Provinsi DI. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI. Yogyakarta. 2018. *Tingkat Kemiskinan provinsi D.I Yogyakarta Kabupaten/Kota*. Provinsi DI. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Bantul dalam Angka*. Bantul: BPS Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka*. Gunung Kidul: BPS Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kulonprogo dalam Angka*. Kulonprogo: BPS Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Sleman dalam Angka*. Sleman: BPS Provinsi D.I Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kota Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I Yogyakarta
- Dewangga Putra, Linggar. 2011. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. Inilah 10 Provinsi dengan Ketimpangan Tertinggi. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/18/inilah-10-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi>. [Diakses 28 Maret 2019].

- Kalalo, Tiffany. 2016. Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Niyimbanira, Ferdinand. 2017. Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *Jurnal: International Journal of Economics and Financial Issues*. 7(4): 254-261.
- Nurlina, T., dan Muhammad Iqbal. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal: Samudra Ekonomika*. 1(2): 175-179.
- Prapti, Lulus. 2006. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004). *Skripsi*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ratri Astute, Restu. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004 – 2012. Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Retnosari, Devi. 2006. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Rinjani, Muhammad Faisal. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Risno. 2017. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Palembang. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Rudiana, Pito Agustin. 2017. Kemiskinan Ancam Warga Yogyakarta, Jadi Tamu di Daerah Sendiri. <https://nasional.tempo.co/read/878763/kemiskinan-ancam-warga-yogyakarta-jadi-tamu-di-daerah-sendiri>. [Diakses 31 Maret 2019]
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Jakarta
- Sholihah, Alfiatus. 2018. Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah dan Kapasitas Fiskal di Provinsi Bali. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

- Taharah, Sofia. 2018. Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Taringan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahiba, Nasfi Fkili., dan Malik El. 2014. The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality (Tunisia). *Jurnal Internasional : Ekonomi dan Masalah Keuangan*. 4(1): 135-143
- Widiarnako. 2013. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990 – 2010. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yayuk, Zamzami. 2014. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. 1(1): 77-83

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian Indeks Gini, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia.

1. Indeks Gini D.I Yogyakarta Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	INDEKS GINI
1.	Kabupaten Bantul	2010	0,27
2.	Kabupaten Bantul	2011	0,37
3.	Kabupaten Bantul	2012	0,4
4.	Kabupaten Bantul	2013	0,4
5.	Kabupaten Bantul	2014	0,39
6.	Kabupaten Bantul	2015	0,38
7.	Kabupaten Bantul	2016	0,4
8.	Kabupaten Gunung Kidul	2010	0,25
9.	Kabupaten Gunung Kidul	2011	0,32
10.	Kabupaten Gunung Kidul	2012	0,35
11.	Kabupaten Gunung Kidul	2013	0,33
12.	Kabupaten Gunung Kidul	2014	0,36
13.	Kabupaten Gunung Kidul	2015	0,32
14.	Kabupaten Gunung Kidul	2016	0,33
15.	Kabupaten Kulonprogo	2010	0,24
16.	Kabupaten Kulonprogo	2011	0,38
17.	Kabupaten Kulonprogo	2012	0,41
18.	Kabupaten Kulonprogo	2013	0,33
19.	Kabupaten Kulonprogo	2014	0,36
20.	Kabupaten Kulonprogo	2015	0,37
21.	Kabupaten Kulonprogo	2016	0,37
22.	Kabupaten Sleman	2010	0,27
23.	Kabupaten Sleman	2011	0,41
24.	Kabupaten Sleman	2012	0,46
25.	Kabupaten Sleman	2013	0,44
26.	Kabupaten Sleman	2014	0,42
27.	Kabupaten Sleman	2015	0,45
28.	Kabupaten Sleman	2016	0,4
29.	Kota Yogyakarta	2010	0,41
30.	Kota Yogyakarta	2011	0,4
31.	Kota Yogyakarta	2012	0,43
32.	Kota Yogyakarta	2013	0,44
33.	Kota Yogyakarta	2014	0,42
34.	Kota Yogyakarta	2015	0,45
35.	Kota Yogyakarta	2016	0,43

2. Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	PDRB (Milyar Rupiah)
1.	Kabupaten Bantul	2010	12.114.059,07
2.	Kabupaten Bantul	2011	12.728.666,29
3.	Kabupaten Bantul	2012	13.407.021,78
4.	Kabupaten Bantul	2013	14.138.719,3
5.	Kabupaten Bantul	2014	14.851.124,13
6.	Kabupaten Bantul	2015	15.588.520,43
7.	Kabupaten Bantul	2016	16.377.984,32
8.	Kabupaten Gunung Kidul	2010	8.848.037,94
9.	Kabupaten Gunung Kidul	2011	9.248.010,91
10.	Kabupaten Gunung Kidul	2012	9.695.979,84
11.	Kabupaten Gunung Kidul	2013	10.177.432,51
12.	Kabupaten Gunung Kidul	2014	10.639.792,32
13.	Kabupaten Gunung Kidul	2015	11.152.363,12
14.	Kabupaten Gunung Kidul	2016	11.697.446,94
15.	Kabupaten Kulonprogo	2010	5.033.073,64
16.	Kabupaten Kulonprogo	2011	5.246.146,78
17.	Kabupaten Kulonprogo	2012	5.475.148,2
18.	Kabupaten Kulonprogo	2013	5.741.660,29
19.	Kabupaten Kulonprogo	2014	6.004.316,44
20.	Kabupaten Kulonprogo	2015	6.281.795,76
21.	Kabupaten Kulonprogo	2016	6.580.776,13
22.	Kabupaten Sleman	2010	21.481.644
23.	Kabupaten Sleman	2011	22.645.851,9
24.	Kabupaten Sleman	2012	23.957.112,8
25.	Kabupaten Sleman	2013	25.367.414,2
26.	Kabupaten Sleman	2014	26.713.071,2
27.	Kabupaten Sleman	2015	28.098.006,9
28.	Kabupaten Sleman	2016	29.573.895
29.	Kota Yogyakarta	2010	17.202.154
30.	Kota Yogyakarta	2011	18.206.089,7
31.	Kota Yogyakarta	2012	19.189.074,8
32.	Kota Yogyakarta	2013	20.239.557,7
33.	Kota Yogyakarta	2014	21.307.763,6
34.	Kota Yogyakarta	2015	22.393.012,2
35.	Kota Yogyakarta	2016	23.538.101,8

3. Jumlah Kemiskinan D.I Yogyakarta Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	KEMISKINAN (Jiwa)
1.	Kabupaten Bantul	2010	146.900
2.	Kabupaten Bantul	2011	159.400
3.	Kabupaten Bantul	2012	158.800
4.	Kabupaten Bantul	2013	156.600
5.	Kabupaten Bantul	2014	153.910
6.	Kabupaten Bantul	2015	160.200
7.	Kabupaten Bantul	2016	142.760
8.	Kabupaten Gunung Kidul	2010	148.730
9.	Kabupaten Gunung Kidul	2011	157.100
10.	Kabupaten Gunung Kidul	2012	157.800
11.	Kabupaten Gunung Kidul	2013	152.400
12.	Kabupaten Gunung Kidul	2014	148.390
13.	Kabupaten Gunung Kidul	2015	148.390
14.	Kabupaten Gunung Kidul	2016	139.150
15.	Kabupaten Kulonprogo	2010	90.060
16.	Kabupaten Kulonprogo	2011	92.760
17.	Kabupaten Kulonprogo	2012	93.210
18.	Kabupaten Kulonprogo	2013	86.500
19.	Kabupaten Kulonprogo	2014	84.670
20.	Kabupaten Kulonprogo	2015	88.130
21.	Kabupaten Kulonprogo	2016	84.340
22.	Kabupaten Sleman	2010	117.024
23.	Kabupaten Sleman	2011	117.324
24.	Kabupaten Sleman	2012	118.000
25.	Kabupaten Sleman	2013	111.000
26.	Kabupaten Sleman	2014	110.000
27.	Kabupaten Sleman	2015	110.960
28.	Kabupaten Sleman	2016	96.630
29.	Kota Yogyakarta	2010	37.000
30.	Kota Yogyakarta	2011	37.700
31.	Kota Yogyakarta	2012	37.400
32.	Kota Yogyakarta	2013	35.600
33.	Kota Yogyakarta	2014	35.600
34.	Kota Yogyakarta	2015	36.000
35.	Kota Yogyakarta	2016	32.060

4. Jumlah Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2016

No.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	IPM (Persen)
1.	Kabupaten Bantul	2010	74,53
2.	Kabupaten Bantul	2011	75,79
3.	Kabupaten Bantul	2012	76,13
4.	Kabupaten Bantul	2013	76,78
5.	Kabupaten Bantul	2014	77,11
6.	Kabupaten Bantul	2015	77,99
7.	Kabupaten Bantul	2016	78,42
8.	Kabupaten Gunung Kidul	2010	70,45
9.	Kabupaten Gunung Kidul	2011	64,83
10.	Kabupaten Gunung Kidul	2012	65,69
11.	Kabupaten Gunung Kidul	2013	66,31
12.	Kabupaten Gunung Kidul	2014	67,03
13.	Kabupaten Gunung Kidul	2015	67,41
14.	Kabupaten Gunung Kidul	2016	67,82
15.	Kabupaten Kulonprogo	2010	74,49
16.	Kabupaten Kulonprogo	2011	69,53
17.	Kabupaten Kulonprogo	2012	69,74
18.	Kabupaten Kulonprogo	2013	70,14
19.	Kabupaten Kulonprogo	2014	70,68
20.	Kabupaten Kulonprogo	2015	71,52
21.	Kabupaten Kulonprogo	2016	72,38
22.	Kabupaten Sleman	2010	78,2
23.	Kabupaten Sleman	2011	80,04
24.	Kabupaten Sleman	2012	80,1
25.	Kabupaten Sleman	2013	80,26
26.	Kabupaten Sleman	2014	80,73
27.	Kabupaten Sleman	2015	81,2
28.	Kabupaten Sleman	2016	82,15
29.	Kota Yogyakarta	2010	79,52
30.	Kota Yogyakarta	2011	82,98
31.	Kota Yogyakarta	2012	83,29
32.	Kota Yogyakarta	2013	83,61
33.	Kota Yogyakarta	2014	83,78
34.	Kota Yogyakarta	2015	84,56
35.	Kota Yogyakarta	2016	85,32

Lampiran 2. Hasil Uji Regresi Data Panel

1. Common Effect Model

Dependent Variable: IG
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/18/19 Time: 19:48
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,243957	0,203789	1,197106	0,2403
PDRB	3,27E-09	1,99E-09	1,643056	0,1105
KMS	-2,84E-07	2,35E-07	-1,207850	0,2362
IPM	0,001494	0,002780	0,537315	0,5949
R-squared	0,443460	Mean dependent var		0,376000
Adjusted R-squared	0,389602	S.D. dependent var		0,057711
S.E. of regression	0,045089	Akaike info criterion		-3,253162
Sum squared resid	0,063023	Schwarz criterion		-3,075408
Log likelihood	60,93034	Hannan-Quinn criter.		-3,191802
F-statistic	8,233776	Durbin-Watson stat		1,436713
Prob(F-statistic)	0,000357			

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: IG
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/18/19 Time: 19:50
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,465470	0,411965	1,129877	0,2685
PDRB	2,38E-08	4,89E-09	4,869109	0,0000
KMS	3,86E-06	1,44E-06	2,691872	0,0120
IPM	-0,011467	0,005041	-2,274841	0,0311

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,695486	Mean dependent var	0,376000
Adjusted R-squared	0,616538	S.D. dependent var	0,057711
S.E. of regression	0,035737	Akaike info criterion	-3,627612
Sum squared resid	0,034483	Schwarz criterion	-3,272103
Log likelihood	71,48320	Hannan-Quinn criter.	-3,504890
F-statistic	8,809403	Durbin-Watson stat	1,676620
Prob(F-statistic)	0,000013		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: IG
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/18/19 Time: 19:52
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 35
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,243957	0,161524	1,510351	0,1411
PDRB	3,27E-09	1,58E-09	2,072992	0,0466
KMS	-2,84E-07	1,86E-07	-1,523906	0,1377
IPM	0,001494	0,002203	0,677913	0,5029

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0,000000	0,0000
Idiosyncratic random		0,035737	1,0000

Weighted Statistics			
R-squared	0,443460	Mean dependent var	0,376000
Adjusted R-squared	0,389602	S.D. dependent var	0,057711
S.E. of regression	0,045089	Sum squared resid	0,063023
F-statistic	8,233776	Durbin-Watson stat	1,436713
Prob(F-statistic)	0,000357		

Unweighted Statistics			
R-squared	0,443460	Mean dependent var	0,376000
Sum squared resid	0,063023	Durbin-Watson stat	1,436713

4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5,586512	(4,27)	0,0021
Cross-section Chi-square	21,105729	4	0,0003

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: IG
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/18/19 Time: 19:51
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,243957	0,203789	1,197106	0,2403
PDRB	3,27E-09	1,99E-09	1,643056	0,1105
KMS	-2,84E-07	2,35E-07	-1,207850	0,2362
IPM	0,001494	0,002780	0,537315	0,5949
R-squared	0,443460	Mean dependent var		0,376000
Adjusted R-squared	0,389602	S.D. dependent var		0,057711
S.E. of regression	0,045089	Akaike info criterion		-3,253162
Sum squared resid	0,063023	Schwarz criterion		-3,075408
Log likelihood	60,93034	Hannan-Quinn criter.		-3,191802
F-statistic	8,233776	Durbin-Watson stat		1,436713
Prob(F-statistic)	0,000357			

5. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22,302611	3	0,0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0,000000	0,000000	0,000000	0,0000
KMS	0,000004	-0,000000	0,000000	0,0036
IPM	-0,011467	0,001494	0,000021	0,0043

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IG

Method: Panel Least Squares

Date: 07/18/19 Time: 19:53

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,465470	0,411965	1,129877	0,2685
PDRB	2,38E-08	4,89E-09	4,869109	0,0000
KMS	3,86E-06	1,44E-06	2,691872	0,0120
IPM	-0,011467	0,005041	-2,274841	0,0311

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,695486	Mean dependent var	0,376000
Adjusted R-squared	0,616538	S.D. dependent var	0,057711
S.E. of regression	0,035737	Akaike info criterion	-3,627612
Sum squared resid	0,034483	Schwarz criterion	-3,272103
Log likelihood	71,48320	Hannan-Quinn criter.	-3,504890
F-statistic	8,809403	Durbin-Watson stat	1,676620
Prob(F-statistic)	0,000013		

6. Uji Multikolinearitas

	PDRB	KMS	IPM
PDRB	1,000000	-0,272859	0,811312
KMS	-0,272859	1,000000	-0,581269
IPM	0,811312	-0,581269	1,000000

7. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/18/19 Time: 20:17
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,061676	0,199870	0,308579	0,7601
IG	-0,194558	0,091238	-2,132430	0,0426
PDRB	-8,92E-10	3,18E-09	-0,280663	0,7812
KMS	1,16E-07	7,66E-07	0,151255	0,8809
IPM	0,000497	0,002609	0,190457	0,8504

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,395803	Mean dependent var	0,025146
Adjusted R-squared	0,209896	S.D. dependent var	0,019061
S.E. of regression	0,016943	Akaike info criterion	-5,100948
Sum squared resid	0,007463	Schwarz criterion	-4,701002
Log likelihood	98,26659	Hannan-Quinn criter.	-4,962887
F-statistic	2,129040	Durbin-Watson stat	1,973274
Prob(F-statistic)	0,069516		

8. Uji Normalitas

